



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 4184-4190

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan SPJ dalam Pengelolaan Keuangan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Zaskia Zahira Sofa¹, Fajar Sriningsih², Muhammad Ichsan Diarsyad³, Dzahin Syauqi Muhammad⁴
^{1,3,4}Universitas Palangka Raya

²Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

¹zahirazaskia76@gmail.com, ²aris.tewel@gmail.com, ³muhhammad.ichsan@feb.upr.ac.id, ⁴dzahinsq@upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan SPJ serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset yang terdiri atas satu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, tiga Penelaah Teknis Kebijakan, dan satu Penata Layanan Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai ketentuan yang berlaku serta didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan SIPD membantu proses penginputan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Namun demikian, keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan pada beberapa kegiatan. Faktor utama penyebab keterlambatan meliputi tingginya aktivitas administrasi pegawai, keterlambatan penyerahan dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kurang lengkapnya dokumen administrasi, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan koordinasi, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum verifikasi, peningkatan kedisiplinan administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan SIPD. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan ketepatan waktu penyusunan SPJ pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Instansi Pemerintah, Keterlambatan, Pengelolaan Keuangan, SPJ, SIPD

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan wajib didukung oleh administrasi pertanggungjawaban yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Akuntabilitas publik menuntut setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat secara terbuka dan tepat waktu sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud [1]. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan prinsip *good governance* [2].

Dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang wajib disusun adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ merupakan dokumen administratif yang berfungsi sebagai bukti bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan [3]. Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar dalam proses verifikasi administrasi keuangan daerah. Ketepatan waktu penyusunan SPJ menjadi salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah karena keterlambatan dalam penyusunannya dapat menghambat proses pelaporan keuangan serta memengaruhi tingkat akuntabilitas instansi pemerintah [4]. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga sangat

dipengaruhi oleh ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi terkait [5].

Meskipun demikian, dalam praktiknya keterlambatan penyusunan SPJ masih sering terjadi pada berbagai instansi pemerintah. Permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun faktor administratif. Tingginya beban kerja pegawai, kurang optimalnya koordinasi antar bagian, rendahnya pemahaman terhadap prosedur administrasi, serta kurang lengkapnya dokumen pendukung menjadi faktor yang sering menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan [6]. Selain itu, keterlambatan penyerahan dokumen dari pihak terkait serta kelalaian dalam penyusunan administrasi juga turut berkontribusi terhadap keterlambatan penyusunan SPJ [7]. Faktor sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek ketelitian, kesiapan administrasi, dan kemampuan teknis pegawai dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban [8].

Selain faktor sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah saat ini telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah dinilai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah [9]. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal juga terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek akurasi data dan ketepatan waktu pelaporan [10]. Selain itu, penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dapat membantu meminimalisir kesalahan administrasi serta mempercepat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan [11].

Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, kualitas pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia turut menentukan keberhasilan proses administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang baik serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses administrasi keuangan [12]. Selain itu, kualitas SPJ juga dipengaruhi oleh ketelitian dalam pencatatan, kelengkapan dokumen pendukung, serta pemahaman pegawai terhadap prosedur administrasi keuangan yang berlaku [13].

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa keterlambatan penyusunan SPJ masih terjadi pada beberapa kegiatan. Meskipun proses pengelolaan keuangan telah dibantu dengan penerapan SIPD, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban pada beberapa kegiatan belum dapat diselesaikan secara tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses administrasi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan dokumen, koordinasi antar pihak terkait, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan.

Penelitian mengenai keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih membahas keterlambatan laporan keuangan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji keterlambatan penyusunan SPJ pada instansi tertentu, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus pembahasan yang lebih spesifik terkait faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut.

Apabila keterlambatan penyusunan SPJ terus terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya proses pelaporan keuangan, menurunnya efektivitas administrasi keuangan, serta berkurangnya tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan SPJ dalam pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan kegiatan, khususnya yang terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih rinci terkait faktor-faktor penyebab keterlambatan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu proses pengelolaan keuangan dan penyusunan SPJ pada instansi tersebut. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti dengan mempertimbangkan konteks organisasi secara menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, khususnya Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait proses penyusunan SPJ, faktor penyebab keterlambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara meramkum memilih dan memfokuskan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dokumentasi yang tersedia. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, diperoleh informasi bahwa pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut telah dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara berurutan mulai dari proses pengajuan kebutuhan anggaran kegiatan, pencairan dana, pelaksanaan pembayaran, penyusunan dokumen pertanggungjawaban, verifikasi administrasi, hingga pelaporan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan tahapan administrasi yang cukup kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi dalam setiap pelaksanaannya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi keuangan kegiatan. Bagian ini tidak hanya bertugas melakukan pencatatan dan penyusunan laporan, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas administrasi untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai keuangan harus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengeluaran, menyesuaikan bukti transaksi dengan kegiatan yang dilaksanakan, melakukan pemotongan dan penyetoran pajak, serta memastikan bahwa seluruh dokumen telah memenuhi syarat administratif sebelum diproses lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan keuangan dalam instansi pemerintah memiliki peranan strategis dalam menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti administrasi yang jelas sehingga proses pelaporan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena seluruh penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah [2]. Selain itu, kualitas sistem pengendalian internal yang baik juga berpengaruh terhadap efektivitas administrasi keuangan serta mampu meminimalisir kesalahan dalam proses pelaporan keuangan daerah [14].

Dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), PPTK memiliki tanggung jawab utama dalam menyiapkan berbagai dokumen pengeluaran kegiatan seperti nota pembelian, kwitansi pembayaran, daftar penerima, surat tugas, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang telah dikumpulkan kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPD melalui Nota Pencatatan Dana (NPD). Setelah data berhasil diinput, dokumen dicetak untuk ditandatangani oleh pihak terkait sebelum diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk diverifikasi. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan SPJ membutuhkan koordinasi antara beberapa pihak sehingga keterlambatan dari salah satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan proses administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SIPD memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan kegiatan pada instansi tersebut. Sebelum penerapan sistem digital, sebagian proses administrasi dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan. Dengan adanya SIPD, penginputan data menjadi lebih terintegrasi karena seluruh informasi keuangan tersimpan dalam satu sistem yang sama. Pegawai keuangan juga dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan data karena sistem secara otomatis membantu menampilkan rincian penggunaan anggaran sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Penggunaan SIPD juga membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain mempermudah penyusunan laporan, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena data yang telah diinput dapat langsung diproses secara otomatis oleh sistem. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan ketelitian administrasi [15]. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses pelaporan keuangan pada instansi pemerintah [16]. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan kualitas data keuangan sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan [17].

Meskipun pengelolaan keuangan telah dibantu dengan penggunaan SIPD, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyusunan SPJ masih ditemukan dalam beberapa kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas kerja pegawai dan kesiapan administrasi dokumen. Pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki tanggung jawab pekerjaan yang cukup banyak dalam waktu yang bersamaan. Selain menyusun SPJ, pegawai juga harus menangani pencairan dana, penyusunan laporan bulanan, pengarsipan dokumen, serta berbagai administrasi keuangan lainnya. Tingginya aktivitas administrasi menyebabkan pegawai sering mengalami kesulitan dalam membagi waktu kerja sehingga beberapa dokumen pertanggungjawaban tidak dapat segera diselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja pegawai menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keterlambatan penyusunan SPJ. Semakin banyak pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penundaan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tingginya beban kerja dapat memengaruhi efektivitas pegawai dalam menyelesaikan administrasi keuangan secara tepat waktu [18]. Aktivitas kerja yang padat juga dapat menyebabkan keterlambatan administrasi karena pegawai harus menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu yang terbatas [19]. Selain itu, keterbatasan waktu kerja dan tingginya intensitas kegiatan administrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada instansi pemerintah [6].

Selain faktor kesibukan pegawai, keterlambatan penyusunan SPJ juga dipengaruhi oleh keterlambatan penyerahan dokumen dari PPTK. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa PPTK terkadang menyerahkan dokumen pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan bagian keuangan tidak dapat segera melakukan proses verifikasi karena dokumen belum tersedia

secara lengkap. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penyerahan dokumen juga menyebabkan pekerjaan pada bagian keuangan menumpuk dalam waktu tertentu sehingga proses administrasi menjadi lebih lambat.

Kelengkapan dokumen administrasi juga menjadi kendala yang cukup sering ditemukan dalam proses penyusunan SPJ. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat dokumen yang diajukan dalam kondisi belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Dokumen yang belum lengkap mengharuskan pegawai keuangan melakukan pemeriksaan ulang dan meminta perbaikan kepada pihak terkait sebelum proses verifikasi dapat dilanjutkan. Situasi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang dan membutuhkan waktu tambahan dalam penyelesaiannya.

Kesiapan dokumen administrasi menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah karena dokumen yang tidak lengkap akan menghambat proses verifikasi administrasi [20]. Ketelitian dan kelengkapan dokumen juga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena seluruh bukti penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku [13]. Administrasi yang tidak tertib dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan serta menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah [5].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyusunan SPJ. Dalam beberapa kondisi, masih ditemukan kurangnya ketelitian pegawai dalam menyusun dokumen administrasi sehingga dokumen yang diajukan harus diperbaiki kembali sebelum diverifikasi. Selain itu, kesiapan pegawai dalam memahami prosedur administrasi keuangan juga memengaruhi kecepatan penyelesaian SPJ. Pegawai yang memahami prosedur dengan baik cenderung lebih cepat menyelesaikan administrasi dibandingkan pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan ketelitian administrasi [21]. Kompetensi pegawai dalam bidang administrasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena setiap proses administrasi membutuhkan ketelitian serta pemahaman prosedur yang baik.

Selain faktor sumber daya manusia dan administrasi dokumen, koordinasi antar bagian juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran penyusunan SPJ. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara PPTK dan Sub Bagian Keuangan sangat menentukan kecepatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, proses perbaikan dokumen dan penyampaian informasi dapat dilakukan lebih cepat sehingga administrasi keuangan dapat segera diselesaikan. Sebaliknya, apabila koordinasi tidak berjalan optimal, maka proses penyelesaian SPJ cenderung mengalami keterlambatan karena adanya keterlambatan penyampaian informasi maupun dokumen pendukung.

Koordinasi yang baik antar bagian dapat meningkatkan efektivitas administrasi keuangan dan membantu mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Komunikasi kerja yang efektif juga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena setiap kendala administrasi dapat segera diselesaikan melalui koordinasi yang baik antar pihak terkait [16]. Selain itu, koordinasi yang efektif menjadi bagian penting dalam mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah [22].

Berikut merupakan ringkasan faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Ringkasan Faktor Penyebab Keterlambatan SPJ

No	Faktor Penyebab	Temuan Penelitian	Dampak
1	Tingginya aktivitas pegawai	Pegawai memiliki banyak pekerjaan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan	Penyusunan SPJ menjadi tertunda
2	Keterlambatan penyerahan dokumen oleh PPTK	Dokumen pertanggungjawaban sering diserahkan tidak tepat waktu	Proses verifikasi dan pencairan dana menjadi terlambat
3	Dokumen administrasi tidak lengkap	Dokumen yang diajukan masih memerlukan perbaikan dan pelengkapan	Verifikasi dilakukan berulang kali
4	Faktor sumber daya manusia	Kurangnya ketelitian dan kesiapan pegawai dalam menyusun SPJ	Ketepatan waktu penyusunan SPJ menurun
5	Koordinasi antar bagian	Komunikasi antar pihak belum sepenuhnya optimal	Penyelesaian administrasi menjadi lebih lambat

No	Faktor Penyebab	Temuan Penelitian	Dampak
6	Pemanfaatan SIPD	SIPD membantu proses penginputan dan pelaporan keuangan	Mempermudah penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa keterlambatan penyusunan SPJ dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Faktor manusia dan administrasi menjadi penyebab yang paling dominan dalam penelitian ini. Meskipun penggunaan SIPD telah membantu proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur, keberhasilan penyusunan SPJ tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan pegawai, kedisiplinan administrasi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kegiatan.

Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan SPJ, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan koordinasi antara PPTK dan bagian keuangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diajukan untuk verifikasi, serta mengingatkan pegawai agar lebih disiplin dalam mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi penggunaan SIPD juga terus dilakukan agar proses penginputan dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian internal yang cukup baik dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal dan koordinasi yang baik menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas kinerja organisasi sektor publik [23].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyusunan SPJ pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah lebih banyak disebabkan oleh faktor internal organisasi dibandingkan faktor sistem. Dari sisi prosedur dan penggunaan teknologi, instansi telah memiliki mekanisme yang cukup baik melalui penerapan SIPD. Namun demikian, faktor sumber daya manusia, kedisiplinan administrasi, kesiapan dokumen, dan koordinasi kerja masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketepatan waktu penyusunan SPJ. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai, penguatan koordinasi antar bagian, serta peningkatan tertib administrasi menjadi langkah penting dalam meminimalisir keterlambatan penyusunan SPJ pada instansi pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Hal ini ditunjukkan melalui adanya prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, verifikasi, hingga pelaporan keuangan yang didukung oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun demikian, keterlambatan dalam proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) masih ditemukan pada beberapa kegiatan, meskipun tidak bersifat signifikan dan masih dapat diatasi. Faktor utama penyebab keterlambatan tersebut berasal dari aspek internal organisasi, terutama pada aspek sumber daya manusia, seperti tingginya beban kerja, kelalaian, serta kurangnya kesiapan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, kelengkapan dokumen dari PPTK juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran proses verifikasi dan pelaporan keuangan. Di sisi lain, penggunaan aplikasi SIPD terbukti memberikan dampak positif dalam membantu meningkatkan efisiensi ketelitian, dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem dan prosedur telah berjalan dengan baik, peran manusia tetap menjadi unsur penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan SPJ. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak instansi pemerintah serta menambah jumlah informan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih beragam dan komprehensif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed method*, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan SPJ.

Referensi

- [1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- [2] P. Nabila dan I. Maulina, "Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–11, Okt 2025, doi: 10.36563/jamanta.v5i1.1517.
- [3] A. Apriliani, K. Ginaldo, dan M. Y. G. Seran, "Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)," *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 1, hlm. 673–681, Jan 2024, doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11627.
- [4] M. K. Machfuda dan N. Kustiningsih, "Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran," *Jurnal Economics and Sustainable Development*, vol. 6, no. 1, hlm. 53–63, 2021.

- [5] S. Sombo, K. H. P. Lambe, dan J. B. Halik, "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTSP Kabupaten Dogiyai)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol. 1, no. 2, hlm. 61–69, Jul 2025, doi: 10.8844/pmxw1z09.
- [6] Y. Pamenta, Y. Pasae, dan S. Y. Sabandar, "Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah," *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, vol. 1, no. 2, hlm. 461–467, Agu 2025, doi: 10.1610/t94k5n82.
- [7] S. M. Wati dan A. P. Nugraheni, "Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeluaran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Magelang," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, vol. 3, no. 2, hlm. 232–239, Mei 2020, doi: 10.36778/jesya.v3i2.159.
- [8] S. Normaliana, F. Rosalia, dan K. A. Suryandari, "Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat Kota Bandar Lampung," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 4, no. 4, Apr 2026, doi: 10.62281/sn8cgp54.
- [9] I. Septiani dan N. W. Isnawaty, "Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 4, hlm. 193–208, 2024, doi: 10.24198/responsive.v7i4.60881.
- [10] L. Djumyati, R. Ramdany, dan S. Susilawati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Journal of Economics and Business UBS*, vol. 14, no. 3, hlm. 451–463, Jun 2025, doi: 10.52644/joeb.v14i3.2689.
- [11] D. A. Firdaus, A. Wicaksono, dan D. Fahriani, "Peran SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dalam Mendukung Sistem Informasi Manajemen Pemerintah di Kecamatan Sidoarjo," *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*, vol. 2, no. 1, hlm. 16–21, Okt 2025, doi: 10.55732/2er50q81.
- [12] M. Indika, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara," *Jurnal Akuntansi*, vol. 14, no. 2, hlm. 167–187, 2020, doi: 10.25170/jak.v14i2.1116.
- [13] Syafridayani, Mustadir, dan I. Safitri, "Analisis Keterlibatan Pegawai Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone," *Center of Economic Students Journal*, vol. 9, no. 1, hlm. 233–240, Jan 2026, doi: 10.56750/hjxkj710.
- [14] E. M. Fauziyah, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, vol. 4, no. 2, hlm. 196–209, Okt 2019, doi: 10.35448/jratirtayasa.v4i2.6386.
- [15] H. Hendarto, K. H. P. Lambe, dan B. Baharuddin, "Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penatausahaan Keuangan yang Ffektif di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah," *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, vol. 1, no. 2, hlm. 129–136, Agu 2025, doi: 10.1610/xmsmb264.
- [16] K. Khuluq, S. Kamariyah, dan I. D. Pramudiana, "Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik," *Soetomo Administrasi Publik*, vol. 2, no. 3, hlm. 681–696, Des 2024.
- [17] R. Utari dan J. P. R. Harahap, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, vol. 2, no. 4, hlm. 362–376, Okt 2024, doi: 10.55606/jumia.v2i4.3353.
- [18] A. Alfian dan R. Rusmiyati, "Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bone," other, IPDN, 2025. Diakses: 15 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://eprints.ipdn.ac.id/22717/>
- [19] V. A. Zega, A. B. Ndraha, M. M. Bate'e, dan M. H. Waruwu, "Analisis Kebijakan Disiplin Waktu dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Desa Loloana'a Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, hlm. 3095–3103, Agu 2025, doi: 10.57250/ajsh.v5i2.1598.
- [20] R. Restie, F. Christian, T. Mentari, dan A. Fahrami, "Pelaksanaan Sistem Administrasi Pengelolaan Dokumen Keuangan pada Bidang Perbendaharaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 4, hlm. 24639–24648, Mei 2026.
- [21] A. Wahtan, N. Hayat, dan S. Sumarni, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *AMFR*, vol. 3, no. 3, hlm. 363–381, Jun 2025, doi: 10.60079/amfr.v3i3.530.
- [22] M. Maharani, E. H. Fanida, Meirinawati, dan T. A. Oktariyanda, "Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daeah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kora Surabaya," *Publika*, vol. 14, no. 1, hlm. 1–10, Jan 2026.
- [23] D. sukma Pangestu, N. N. Andini, M. I. Marcus, A. F. Y. Putra, dan A. Nur, "Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Dalam Pengambilan Keputusan Menuju Good Governance," *Journal ANC*, vol. 1, no. 5, hlm. 210–222, Nov 2025.